

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL* *RESTATEMENT*

Felicia Melinia Jovani^{1)*}, Lindrawati²⁾, Mudjilah Rahayu³⁾

^{1,2,3)}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Email: feliciajovani00@gmail.com

Diterima 11 Oktober 2021 / Disetujui 8 Februari 2022

ABSTRACT: Every business needs to collect funding, especially from investors, where these funds need to be responsible by management in the financial reports. In company, can be found financial restatement because of changes in accounting policies and errors. Misstatement of financial statements can be prevented by implementation of good corporate governance, which is carried out by the board assisted by audit committee which has its own characteristics. Therefore this study aims to examine and analyze the effect of the board of commissioner characteristics and audit committee characteristics on financial restatement. This research design is quantitative with hypothesis testing. The dependent variable is financial restatement, while the independent variable is board of commissioner characteristics, which is board size, board gender, board age, board tenure, multiple directorships. Also audit committee characteristics which is size of audit committee, competence of audit committee, independence of audit committee. The research's object is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the data analysis used in this research was logistic regression. The results showed that the board of commissioner characteristics represented by board gender and board tenure had a negative effect on financial restatement, while the board of commissioner characteristics represented by board size, board age, and multiple directorships had no effect on financial restatement. In addition, the audit committee characteristics represented by the size of audit committee, the competence the audit committee, and the independence of audit committee also have no effect on financial restatement.

Keywords: Financial restatement, board of commissioner characteristics, audit committee characteristics.

ABSTRAK: Bisnis usaha tentunya akan selalu membutuhkan pendanaan khususnya berasal dari investor, dimana pendanaan tersebut akan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. *Financial restatement* dapat terjadi pada perusahaan akibat adanya perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, dan untuk mencegahnya dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja manajemen yang dijalankan oleh dewan komisaris dibantu dengan komite audit yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap *financial restatement*. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. *Financial restatement* dalam penelitian ini adalah variabel dependen sedangkan variabel independen yang digunakan adalah karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit, dimana karakteristik dewan komisaris meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, usia dewan komisaris, masa jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris, sedangkan karakteristik komite audit meliputi ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan analisis data regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik dewan komisaris yang diwakili oleh keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*, sedangkan karakteristik dewan komisaris yang diwakili oleh ukuran dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*. Selain itu, karakteristik komite audit yang diwakili dengan ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*.

Kata Kunci: penyajian kembali laporan keuangan, karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit.

Pendahuluan

Dalam mengembangkan bisnis usahanya, perusahaan memerlukan pendanaan dimana salah satunya dapat berasal dari investor. Laporan keuangan menjadi sarana yang dapat digunakan untuk menarik perhatian investor dan merupakan media pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada *shareholder* atas pengelolaan dananya. Manajemen sebagai pihak pengelola serta penyusun laporan keuangan mempunyai informasi yang lebih luas dibandingkan dengan *shareholder* sehingga timbul asimetri informasi yang mampu menimbulkan konflik kepentingan antara pihak-pihak tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik demi mencapai keuntungan pribadinya. Manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan semata-mata agar kinerjanya terlihat baik dikacamata investor. Hal inilah yang seringkali menyebabkan laporan keuangan gagal mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga diperlukan penyajian kembali atas laporan keuangan (*financial restatement*).

Financial restatement di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk yang melakukan salah saji pada *revenue recognition*, yaitu *revenue* sudah dicatat sebelum waktunya sehingga menyebabkan total laba perusahaan terlalu tinggi (CNN Indonesia, 2019). Selain itu, *financial restatement* juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melaporkan laba semu sehingga tidak mampu memenuhi klaim polis asuransi pelanggannya (CNBC Indonesia, 2019). Hal ini membuat PT Asuransi Jiwasraya harus melakukan *financial restatement* sehingga informasi keuangan perusahaan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dari kasus-kasus ini terlihat bahwa *financial restatement* terjadi dikarenakan berbagai macam faktor sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *financial restatement*.

Pada penelitian ini penyebab *financial restatement* yang digunakan adalah

perubahan kebijakan akuntansi bersifat sukarela dan kesalahan mendasar. Adanya perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat wajib tidak diteliti sebagai penyebab *financial restatement* karena perubahannya bersifat *mandatory* oleh PSAK sehingga tidak menunjukkan penyebab manajemen melakukan salah saji laporan keuangan. Teori yang menjadi dasar penelitian ialah teori keagenan yang menjelaskan keterkaitan antara hubungan pemilik modal (prinsipal) dan pihak yang mengelola organisasi (agen). Hubungan tersebut terhubung dalam suatu kontrak yang memungkinkan terjadinya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen yang selanjutnya dikenal sebagai hubungan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Pihak manajemen yang telah dipercayai wewenang oleh pemegang saham tersebut seharusnya memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Namun pada kenyataannya, terdapat asimetri informasi yang menyebabkan manajemen memiliki peluang untuk melakukan tindakan oportunistik yang dapat mempengaruhi salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen yaitu laporan keuangan. Tindakan oportunistik manajemen dengan memanipulasi laporan keuangan dapat dicegah melalui fungsi pengawasan yang dapat diciptakan melalui implementasi *good corporate governance* (GCG).

GCG merupakan sebuah sistem yang dijalankan oleh organ-organ perusahaan untuk mengatur hubungan antara *stakeholders* khususnya pemegang saham dan manajemen agar tidak terjadi konflik kepentingan (Latifah, dkk., 2019). Untuk memastikan terlaksananya GCG, perusahaan harus terlebih dahulu membangun kondisi internal perusahaan yang kondusif salah satunya melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dibantu dengan komite audit. Dewan komisaris merupakan pengendalian internal tertinggi karena merupakan perwakilan pemegang saham yang ditugasi untuk langsung mengawasi jalannya perusahaan. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang berfungsi mengawasi tata kelola perusahaan, kinerja manajemen, dan atas laporan keuangan

(Lukviarman, 2016:203-204). Baik dewan komisaris maupun komite audit memiliki karakteristik tersendiri, dimana istilah karakteristik mengacu pada ciri yang melekat pada diri seseorang seperti usia, *gender*, dan pengetahuan (Caragih, 2013).

Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris yang meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, usia dewan komisaris, masa jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris serta karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit.

Variabel pertama adalah ukuran dewan komisaris. Menurut Hasnan dan Marzuki (2017) dan Yuristrisia (2008) ukuran dewan komisaris mampu meningkatkan keefektivitasan pengawasan sehingga manajemen tidak dapat melakukan salah saji laporan keuangan dan perusahaan tidak perlu melakukan *financial restatement*. Berbeda halnya dengan Siregar dan Rahayu (2018) serta Abdullah, Yusof, dan Nor (2010) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* karena ukuran dewan komisaris perlu disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan.

Variabel kedua adalah keberadaan wanita dalam jajaran komisaris. Dalam hal ini, keberadaan wanita dinilai mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen (Abbott, Parker, dan Presley, 2012), dimana dewan komisaris wanita dianggap lebih teliti, kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar sehingga kinerja manajemen dapat diawasi dengan baik dan salah saji laporan keuangan yang menyebabkan *financial restatement* tidak terjadi (Puspita dan Januarti, 2014). Berbeda halnya dengan Hasnan dan Marzuki (2017) yang mengatakan bahwa keberadaan dewan komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* karena dewan komisaris pria maupun wanita tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam mengawasi kinerja manajemen.

Variabel ketiga adalah usia dewan komisaris. Usia dinilai mampu mempengaruhi kualitas kinerja di perusahaan (Mahadeo, Soobaroyen, dan Hanuman, 2012). Usia mampu mencerminkan tingkat

pengalaman, wawasan, dan kompetensi yang lebih luas (Hasnan dan Marzuki, 2017). Dengan demikian semakin besar usia dewan komisaris dapat meningkatkan keefektivitasan pengawasan sehingga manajemen tidak melakukan salah saji laporan keuangan dan perusahaan tidak perlu melakukan *financial restatement*.

Variabel keempat adalah masa jabatan dewan komisaris. Semakin lama masa jabatan seorang dewan komisaris maka mampu menunjukkan tingkat kredibilitas kerja serta pemahaman yang lebih mendalam terkait lingkungan perusahaan (Donoher, 2009). Dengan demikian apabila dewan komisaris telah memahami lingkungan perusahaan serta pola kinerja manajemen selama periode tertentu maka hal tersebut dapat meningkatkan keefektivitasan pengawasan sehingga salah saji laporan keuangan yang menyebabkan *financial restatement* tidak terjadi. Berbeda halnya dengan Hasnan dan Marzuki (2017) yang menyebutkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh masa jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*. Fungsi pengawasan terhadap manajemen dinilai lebih baik jika dilakukan oleh komisaris yang sudah lama menjabat di perusahaan.

Variabel kelima adalah rangkap jabatan dewan komisaris. Rangkap jabatan yang dimiliki oleh dewan komisaris dinilai mampu memberikan fungsi pengawasan yang lebih baik karena dewan komisaris memiliki pengalaman serta mampu membandingkan fungsi pengawasan mana yang lebih optimal jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dengan semakin efektifnya pengawasan di perusahaan maka salah saji laporan yang menyebabkan *financial restatement* tidak terjadi. Berbeda halnya dengan Hasnan dan Hussain (2015) yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* dikarenakan rangkap jabatan dewan komisaris yang akan menyebabkan keterbatasan waktu sehingga sulit untuk berfokus pada pengawasan di suatu perusahaan.

Variabel keenam adalah ukuran komite audit. Semakin besar ukuran komite audit dinilai mampu memudahkan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan laporan keuangan sehingga tidak terjadi salah saji

laporan keuangan yang menyebabkan *financial restatement* (Mohammad, dkk., 2018). Namun lain halnya pada penelitian Hasnan, Rahman, dan Ali (2019), Siregar dan Rahayu (2018), serta Kusumo dan Meiranto (2014) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* dikarenakan jumlah anggota komite audit ditentukan oleh ukuran dan kompleksitas perusahaan.

Variabel ketujuh adalah kompetensi komite audit. Kompetensi komite audit dilihat berdasarkan proporsi jumlah anggota komite yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga manajemen tidak dapat melakukan salah saji laporan keuangan yang menyebabkan *financial restatement* (Mohammad, dkk., 2018). Lain halnya dengan Hasnan, dkk. (2019), Rani dan Syafruddin (2011), serta Lin, Li, dan yang (2006) yang mengatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* karena dengan adanya kompetensi komite audit tidak mampu menjamin bahwa motif manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan tidak pernah muncul.

Variabel kedelapan adalah independensi komite audit. Tingkat independensi komite audit dapat dilihat dari proporsi jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen. Semakin besar komite audit yang berasal dari komisaris independen maka kualitas pengawasan yang dilakukan juga akan semakin baik karena komisaris independen lebih sering terlibat dalam rapat bersama dewan direksi sehingga salah saji laporan keuangan yang menyebabkan *financial restatement* tidak terjadi (Mohammad, dkk., 2018), sedangkan menurut Hasnan, dkk., (2019) dan Carcello, Neal, Palmrose, dan Scholz (2011) menjelaskan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* karena kehadiran komisaris independen dalam komite audit tidak dapat menjamin bahwa fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif.

Adanya peristiwa yang terjadi pada PT Garuda Indonesia dan PT Asuransi Jiwasraya membuktikan bahwa salah saji pada laporan keuangan masih sering terjadi. Salah saji

laporan keuangan dapat dicegah dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen melalui pelaksanaan *good corporate governance*, dimana fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh dewan komisaris dibantu dengan komite audit yang memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap *financial restatement*. Karakteristik dewan komisaris akan diwakili dengan ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, usia dewan komisaris, lama jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris sedangkan karakteristik komite audit diwakili dengan ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris yang meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, usia dewan komisaris, masa jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris serta karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit berpengaruh terhadap *financial restatement* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya yang akan meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis utama yaitu:

1. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Financial Restatement

Tanggung jawab dewan komisaris ialah mengawasi jalannya kebijakan, tata kelola, dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan manajemen untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris memiliki beberapa karakteristik berikut yang dinilai mampu

mempengaruhi kinerja dewan komisaris tersebut (Hasnan dan Marzuki, 2017).

a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Restatement*

Ukuran dewan komisaris adalah total anggota dewan komisaris termasuk komisaris independen perusahaan (Siregar dan Rahayu, 2018). Menurut penelitian Hasnan dan Marzuki (2017), makin besar ukuran dewan komisaris artinya total anggota dewan komisaris yang melakukan pengawasan juga semakin banyak sehingga dengan semakin efektifnya pengawasan tersebut manajemen tidak dapat melakukan salah saji laporan keuangan yang mengakibatkan *financial restatement*.

Semakin kecil ukuran dewan komisaris dikhawatirkan dapat menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan karena seluruh tanggung jawab dewan akan dilimpahkan pada komisaris yang jumlahnya sedikit. Sebaliknya, jika ukuran dewan komisaris makin besar maka mampu memberi kemudahan dalam proses pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga masalah keagenan dapat dihindari (Siregar dan Rahayu, 2018). Dengan demikian, apabila pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen semakin baik maka *financial restatement* tidak terjadi karena manajemen akan menyusun laporan keuangan secara apa adanya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis:

H1_a: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

b. Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris terhadap *Financial Restatement*

Keberagaman gender termasuk kekayaan sumber daya manusia di perusahaan. Adanya keberagaman gender ini baik adanya karena mampu menawarkan ide-ide baru, gagasan, serta peningkatan pengawasan strategis di perusahaan (Arfken, Bellar, dan Helms, 2004; dalam Puspita dan Januarti, 2014). Keberagaman gender dalam jajaran komisaris dilihat dengan ada tidaknya komisaris pria dan wanita. Hasil penelitian

Adams dan Feirerra (2009) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cara berpikir, pola pengambilan keputusan, dan tipe kepemimpinan antara dewan komisaris pria dan wanita.

Dewan komisaris wanita cenderung memiliki pemikiran yang lebih kritis, teliti, dan peka terhadap lingkungan sekitar dalam memutuskan suatu pengambilan keputusan (Puspita dan Januarti, 2014). Dengan demikian dewan komisaris wanita dapat lebih mudah mengidentifikasi adanya indikasi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga manajemen tidak lagi dapat melakukan tindakan oportunistik demi keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, apabila dalam susunan dewan komisaris memiliki setidaknya 1 (satu) orang dewan komisaris wanita maka pengawasan yang dilakukan kepada manajemen dinilai lebih baik sehingga manajemen akan menyajikan laporan keuangan perusahaan apa adanya sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dengan demikian apabila laporan keuangan telah tersaji secara apa adanya maka perusahaan tidak akan melakukan *financial restatement*. Hal ini didukung dengan penelitian Hasnan dan Marzuki (2017) serta Puspita dan Januarti (2014) yang menyebutkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disusun hipotesis:

H1_b: Keberadaan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

c. Pengaruh Usia Dewan Komisaris terhadap *Financial Restatement*

Usia dewan komisaris memperlihatkan berapa tahun usia seorang dewan komisaris ketika menjabat di perusahaan. Hal yang menjadi pertimbangan pengangkatan dewan komisaris tentunya adalah syarat objektif dimana seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Usia dewan komisaris secara tidak langsung mencerminkan kematangan seseorang,

baik dari segi pengalaman maupun pengetahuan.

Hasil penelitian Mahadeo, dkk. (2012) menyebutkan bahwa usia dewan komisaris mampu mempengaruhi kualitas kinerja dewan komisaris tersebut. Dewan komisaris yang memiliki rata-rata usia yang lebih besar dianggap lebih memiliki pengalaman bisnis yang cukup, wawasan yang luas, bertindak secara stabil (tidak impulsif), dan telah mampu menilai serta mengawasi kinerja manajemen dengan kritis. Dengan demikian, usia dewan komisaris yang semakin besar akan memperlihatkan kualitas pengawasan yang lebih baik sehingga manajemen tidak memiliki ruang untuk melakukan salah saji laporan keuangan. Dengan begitu, apabila laporan keuangan perusahaan telah tersaji sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, maka perusahaan tidak perlu melakukan *financial restatement*. Hal ini juga didukung dengan penelitian Hasnan dan Marzuki (2017) yang menyebutkan bahwa usia dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disusun hipotesis: H1_c: Usia dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

d. Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap *Financial Restatement*

Masa jabatan dewan komisaris menunjukkan seberapa lama dewan komisaris menjabat pada posisi tersebut. Masa jabatan dewan komisaris dianggap mampu mempengaruhi kinerja dewan komisaris tersebut, dimana dewan komisaris yang memiliki rata-rata masa jabatan yang lama akan lebih mampu memahami secara mendalam mengenai lingkungan bisnis dan kebijakan akuntansi perusahaan dibandingkan dengan dewan komisaris yang baru menjabat (Hasnan dan Marzuki, 2017).

Dewan komisaris yang telah lama menjabat pada suatu posisi tersebut memiliki pengalaman yang lebih banyak serta mampu menunjukkan tingkat kredibilitas kinerjanya melalui pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mampu menciptakan keefektifitasan

pengawasan dewan komisaris. Dengan demikian, jika pengawasan dilakukan dengan baik maka manajemen akan menyusun laporan keuangan dengan apa adanya sehingga perusahaan tidak perlu melakukan *financial restatement*. Hal ini didukung dengan penelitian Hasnan dan Marzuki (2017) dan Donoher (2009) yang menyebutkan bahwa masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disusun hipotesis:

H1_d: Masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

e. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Komisaris terhadap *Financial Restatement*

Rangkap jabatan komisaris dapat ditunjukkan dari komisaris dengan jabatan lebih dari satu, seperti menduduki jabatan komisaris atau direksi di lebih dari satu perusahaan (Hasnan dan Hussain, 2015). Dewan komisaris yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain akan mampu membandingkan dan melakukan perbaikan terhadap kualitas fungsi pengawasannya karena dewan komisaris memiliki komparasi untuk melihat sistematika pengawasan mana yang lebih efektif dilakukan. Apabila fungsi pengawasan komisaris terhadap manajemen semakin baik maka *financial restatement* tidak akan terjadi karena manajemen akan menyusun laporan keuangan secara apa adanya. Hal ini didukung dengan penelitian Hasnan dan Marzuki (2017), bahwa rangkap jabatan dewan komisaris memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap *financial restatement*. Dari pemaparan di atas dapat disusun hipotesis: H1_e: Rangkap jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

2. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Financial Restatement*

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk membentuk komite guna membantu fungsi pengawasan terhadap manajemen, salah satu komite tersebut adalah komite audit. Komite audit berfungsi menjalankan pengawasan

terhadap perusahaan, tata kelola perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini akan membahas karakteristik komite yang meliputi:

a. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Restatement*

Ukuran komite audit menunjukkan total anggota komite yang berada di perusahaan. Jumlah komite audit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dimana jumlah komite audit minimal 3 (tiga) orang yang termasuk di dalamnya adalah komisaris independen serta pihak dari eksternal perusahaan. Ukuran komite audit menjadi faktor penentu sekaligus pendukung dalam keberhasilan pencapaian tujuan komite audit itu sendiri.

Jumlah anggota komite audit yang semakin banyak mampu menunjang fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan untuk semakin baik (Mohammad, dkk., 2018). Oleh karena itu manajemen akan menyusun laporan keuangan secara apa adanya sehingga perusahaan juga tidak akan melakukan *financial restatement*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mohammad, dkk. (2018) serta Hasnan, dkk. (2019) yang menjelaskan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Dari pemaparan tersebut disusun hipotesis:

H2_a: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

b. Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Financial Restatement*

Komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan. Untuk menunjang fungsi tersebut maka kompetensi komite audit menjadi hal yang sangat penting. Latar belakang pendidikan komite audit dalam bidang akuntansi atau keuangan merupakan sebuah poin penting dalam proses penelaahan laporan keuangan. Dengan demikian jika proporsi anggota komite yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan semakin besar maka fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan yang dijalankan juga akan semakin baik

dan manajemen tidak memiliki peluang melakukan manipulasi laporan keuangan yang pada akhirnya membuat perusahaan melakukan *financial restatement*. Hal ini sejalan dengan penelitian Mohammad, dkk. (2018) serta Hasnan, dkk. (2019) yang menjelaskan jika kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Dari pemaparan tersebut disusunlah hipotesis:

H2_b: Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

c. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Financial Restatement*

Komite audit merupakan komite yang bersifat independen dimana anggota komitenya berasal dari komisaris independen serta pihak luar perusahaan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengartikan independensi ialah pihak di luar entitas yang tidak mempunyai hubungan usaha dan afiliasi dengan entitas, jajaran dewan dan pemegang saham utama. Independensi ini diperlukan agar dalam melaksanakan fungsi pengawasannya komite audit tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain.

Komisaris independen yang bergabung dalam komite audit tentunya mempunyai pemahaman lebih tentang informasi perusahaan dan sering terlibat dengan rapat bersama dewan direksi sehingga dengan hal tersebut fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit dapat dijalankan dengan lebih optimal (Mohammad, dkk., 2018). Komite audit yang memiliki proporsi keanggotaan komisaris independen yang lebih besar dinilai lebih mampu menciptakan keefektifitasan fungsi pengawasan terhadap perusahaan sehingga *financial restatement* tidak terjadi (Hasnan, dkk., 2019). Dari penjelasan tersebut disusunlah hipotesis:

H2_c: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

Metode Penelitian

Populasi penelitian yaitu semua perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan data selama 2014-2019. Dari total populasi perusahaan manufaktur sejumlah 193 perusahaan, terpilih 86 perusahaan selama 5 tahun periode penelitian sehingga total terdapat 430 sampel. Sampel dipilih dari teknik *purposive sampling* dengan pemberian kriteria:

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI secara terus-menerus pada tahun 2014-2019.
2. Perusahaan manufaktur dengan laporan tahunan yang tersedia secara lengkap di situs BEI selama terus-menerus pada tahun 2014-2019.
3. Perusahaan manufaktur dengan laporan tahunan yang menyediakan informasi usia dewan komisaris dan latar belakang pendidikan komite audit.

Penelitian kuantitatif ini yang memakai analisis regresi logistik yang persamaannya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\ln \frac{FR}{1-FR} = a - \beta_1 UD - \beta_2 KW - \beta_3 US - \beta_4 MK - \beta_5 RK - \beta_6 UK - \beta_7 KK - \beta_8 IK + \varepsilon$$

Keterangan:

FR = *Financial restatement*

a = Konstanta

β = Koefisien

UD = Ukuran dewan komisaris

KW = Keberadaan wanita dalam dewan komisaris

US = Usia dewan komisaris

MK = Masa jabatan dewan komisaris

RK = Rangkap jabatan dewan komisaris

UK = Ukuran komite audit

KK = Kompetensi komite audit

IK = Independensi komite audit

ε = *error*

Setelah menentukan persamaan regresi logistik, tahap selanjutnya adalah melakukan uji model fit, uji kelayakan model regresi yang diukur dengan uji Hosmer dan Lemeshow, uji koefisien determinasi yang diukur dengan Nagelkerke's *R Square*, uji ketepatan klasifikasi, dan pengujian hipotesis (Ghozali, 2016).

Berikut adalah pengukuran variabel pada penelitian:

- a. Variabel dependen, *Financial Restatement* (FR) yaitu penyajian kembali atas komponen laporan keuangan di periode sebelumnya yang dapat disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi (bersifat wajib maupun sukarela) dan kesalahan mendasar (IAI, 2018). *Financial restatement* yang dipakai pada penelitian ini adalah perubahan kebijakan akuntansi bersifat sukarela dan kesalahan mendasar. FR dilihat berdasarkan variabel *dummy* dengan indeks 1 untuk perusahaan yang melakukan *financial restatement* pada tahun t+1 dan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan *financial restatement* pada tahun t+1.

- b. Variabel independen, yaitu:

1. Karakteristik Dewan Komisaris (DK)

- a. Ukuran dewan komisaris (UD) adalah total anggota dewan komisaris, baik itu komisaris independen dari eksternal perusahaan maupun komisaris dari internal perusahaan (Siregar dan Rahayu, 2018). UD diukur dengan menggunakan skala 1-5, dimana angka 1 (apabila total anggota dewan komisaris < 3 orang), angka 2 (apabila total anggota dewan komisaris = 3 orang), angka 3 (apabila total anggota dewan komisaris 4-6 orang), angka 4 (apabila total anggota dewan komisaris 7-9 orang), dan angka 5 (apabila total anggota dewan komisaris \geq 10 orang) (Hasnan dan Marzuki, 2017).

- b. Keberadaan wanita dalam dewan komisaris (KW) merupakan adanya dewan komisaris wanita dalam jajaran komisaris. Pada penelitian ini keberadaan wanita dalam komisaris ditandai oleh variabel *dummy* dengan indeks 1 untuk perusahaan yang mempunyai setidaknya satu komisaris wanita dalam jajaran komisaris dan 0 jika perusahaan sama sekali tidak mempunyai komisaris wanita (Puspita dan Januarti, 2014).

c.Usia Dewan Komisaris (US) menunjukkan usia komisaris saat menjabat dalam keanggotaan dewan komisaris perusahaan. Usia dewan komisaris pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan rata-rata usia dewan komisaris (Hasnan dan Marzuki, 2017)dengan rumus sebagai berikut:

$$US = \frac{\sum \text{usia dewan komisaris}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$$

d. Masa jabatan dewan komisaris (MK) menunjukkan seberapa lama seorang dewan komisaris telah menjabat pada posisi komisaris. Masa jabatan dewan komisaris pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan rata-rata masa menjabat dewan komisaris (Donoher, 2009), dengan rumus sebagai berikut:

$$MK = \frac{\sum \text{masa jabatan dewan komisaris}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$$

e.Rangkap jabatan dewan komisaris (RK) ditandai dengan adanya dewan komisaris yang menempati jabatan dewan, baik itu dewan komisaris ataupun dewan direksi di lebih dari satu perusahaan (Hasnan dan Hussain, 2015). RK diukur dengan menggunakan presentase dewan komisaris yang memiliki rangkap jabatan dewan (baik itu dewan komisaris ataupun dewan direksi) di perusahaan lain (Hasnan dan Marzuki, 2017), dengan rumus sebagai berikut:

$$RK = \frac{\sum \text{dewan komisaris merangkap jabatan}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$$

2. Karakteristik Komite Audit (KA)

a. Ukuran Komite Audit (UK) adalah total anggota komite audit di perusahaan yang akan diukur dengan menggunakan total anggota komite audit yang berada di suatu perusahaan (Mohammad, dkk., 2018).

b. Kompetensi Komite Audit (KK) menunjukkan keahlian atau kemampuan seorang anggota komite audit yang dapat tercermin melalui pendidikan seseorang. Pengukuran kompetensi ini diukur dengan menggunakan proporsi antara jumlah anggota komite audit yang menempuh pendidikan akuntansi atau keuangan di suatu perusahaan dibagi seluruh anggota komite audit (Mohammad, dkk., 2018) dengan rumus berikut:

$$KK = \frac{\sum \text{komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan}}{\sum \text{anggota komite audit}}$$

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Statistik Deskriptif

Pada tabel 1 adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari total 430 sampel. Hasil tersebut memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel independen dalam penelitian ini.

Distribusi Frekuensi Variabel KW dan FR

Pada tabel 2 menunjukkan jumlah frekuensi terkait variabel KW dan FR selama tahun 2014-2018. Dapat dilihat bahwa perusahaan yang memiliki komisaris wanita dalam jajaran komisaris sebanyak 38,14% atau setara dengan 164 sampel, sedangkan sebanyak 61,86% atau setara dengan 266 sampel perusahaan tidak memiliki dewan komisaris wanita. *Financial restatement* pada tahun t+1. terjadi sebanyak 9,07% atau setara dengan 39 sampel sedangkan sisanya sebanyak 90,93% atau setara dengan 391 sampel tidak melakukan *financial restatement* pada tahun t+1. Dengan demikian hasil analisis statistik dekriptif menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang melakukan *financial restatement* pada tahun t+1 selama tahun 2014-2018.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
UD	430	2,47	0,783	1	5
US	430	60,0954	6,5747	35,5	80,3333
MK	430	7,5863	5,8551	0	26,6667
RK	430	0,2258	0,2544	0	1
UK	430	3,05	0,392	0	5
KK	430	0,6559	0,2873	0	1
IK	430	0,3704	0,123	0,25	1

Sumber: data diolah penulis

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel KW dan FR

Variabel	Keterangan	Nilai	Frekuensi	Persentase
KW	Perusahaan yang memiliki dewan komisaris wanita	1	164	38.14%
	Perusahaan yang tidak memiliki dewan komisaris wanita	0	266	61.86%
	Total		430	100%
FR	Perusahaan yang melakukan <i>financial restatement</i> pada tahun t+1	1	39	9.07%
	Perusahaan yang tidak melakukan <i>financial restatement</i> pada tahun t+1	0	391	90.93%
	Total		430	100%

Sumber: data diolah penulis

Tabel 3. Uji Model Fit

<i>-2 Log Likelihood</i>	Nilai
<i>Block 0</i>	270,084
<i>Block 1</i>	236,593
Keterangan	Model Penelitian fit dengan data

Sumber: data diolah penulis

Tabel 4. Uji Hosmer dan Lemeshow

Step	Chi-Square	Sig.	Keterangan
1	3,677	0,885	Model regresi layak digunakan

Sumber: data diolah penulis

Uji Model Fit

Uji model fit membandingkan nilai -2LogL awal dan -2LogL akhir. Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa model penelitian fit dengan data karena -2LogL awal lebih besar daripada -2LogL akhir.

Uji Kelayakan Model Regresi

Pengujian ini dilakukan dengan Hosmer dan Lemeshow untuk mengetahui layak atau tidaknya model regresi pada penelitian ini. Data di Tabel 4 menunjukkan model regresi telah layak digunakan karena tingkat signifikansi berada diatas 0,05.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini melihat nilai Nagelkerke's *R Square* yaitu modifikasi dari koefisien Cox dan Snell. Pada tabel 5, nilai Nagelkerke's *R Square* sebesar 0,124 artinya variabel dependen yaitu *financial restatement* dapat dijelaskan oleh variabel independen

penelitian sebesar 12,4% dan 87,6% sisanya oleh variabel independen lain.

Uji Ketepatan Klasifikasi

Uji ketepatan klasifikasi dilakukan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan dari nilai estimasi. Hasil prediksi pada tabel 6 memperkirakan bahwa tidak ada perusahaan yang melakukan *financial restatement*, namun berdasarkan hasil observasi yang sebenarnya ternyata menunjukkan bahwa 391 perusahaan tidak melakukan *financial restatement* dan sebanyak 39 perusahaan melakukan *financial restatement*. *Overall percentage* di atas telah melebihi 50% yaitu sebesar 90,9% sehingga model regresi logistik dinilai mampu memprediksi hasil penelitian dengan baik.

Tabel 5. Uji Nagelkerke's *R Square*

Step	-2 Log Likelihood	Cox dan Snell R Square	Nagelkerke's R Square
1	236,593	0,056	0,124

Sumber: data diolah penulis

Tabel 6. Uji Ketepatan Klasifikasi

Observed	Predicted		Percentage Correct
	Tidak Restatement	Restatement	
Tidak Restatement	391	0	100,0
Restatement	39	0	0
Overall Percentage			90,0

Sumber: data diolah penulis

Tabel 7. Uji Model Regresi Logistik

Variabel	B	S.E.	Sig.	Exp (B)	Keterangan
UD	0,53	0,255	0,549	1,156	Tidak Signifikan
KW	-0,849	0,372	0,023	0,428	Signifikan, Negatif
US	0,025	0,036	0,484	1,025	Tidak Signifikan
MK	-0,151	0,057	0,008	0,860	Signifikan, Negatif
RK	-0,295	0,869	0,734	0,745	Tidak Signifikan
UK	0,324	0,415	0,434	1,383	Tidak Signifikan
KK	-0,446	0,618	0,47	0,640	Tidak Signifikan
IK	0,443	1,281	0,729	1,558	Tidak Signifikan
Konstanta	-3,678	2,317	0,112	0,025	

Sumber: data diolah penulis

Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan model regresi logistik yang hasilnya tertera pada tabel 7 sehingga didapat persamaan model regresi logistik:

$$\ln \frac{FR}{1-FR} = -3,678 + 0,153UD - 0,849KW + 0,025US \\ - 0,151MK - 0,295RK + 0,324UK \\ - 0,446KK + 0,443IK + \varepsilon$$

Kesimpulan yang didapat dari persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta sebesar -3,678 yang memiliki makna bahwa apabila UD, KW, US, MK, RK, UK, KK, dan IK bernilai nol, maka dapat mempengaruhi *financial restatement* sebesar -3,678.
2. Nilai koefisien regresi (β_1) untuk UD adalah 0,153 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel UD dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menjadi meningkat sebanyak 0,153.
3. Nilai koefisien regresi (β_2) untuk KW adalah -0,849 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel KW dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* akan menurun sebanyak 0,849.
4. Nilai koefisien regresi (β_3) untuk US adalah 0,025 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel US dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menjadi meningkat sebanyak 0,025.
5. Nilai koefisien regresi (β_4) untuk MK adalah -0,151 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel MK dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menurun sebanyak 0,151.
6. Nilai koefisien regresi (β_5) untuk RK adalah -0,295 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel RK dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menurun sebanyak 0,295.
7. Nilai koefisien regresi (β_6) untuk UK adalah 0,324 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel UK dengan anggapan variabel

lainnya tetap maka *financial restatement* menjadi meningkat sebanyak 0,324.

8. Nilai koefisien regresi (β_7) untuk KK adalah -0,446 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel KK dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menurun sebanyak 0,446.
9. Nilai koefisien regresi (β_8) untuk IK adalah 0,443 yang memiliki makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien variabel IK dengan anggapan variabel lainnya tetap maka *financial restatement* menjadi meningkat sebanyak 0,443.

Pembahasan

1. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Financial Restatement

a. Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil uji, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial restatement* sehingga H_{1a} ditolak. Hal ini sama dengan hasil Siregar dan Rahayu (2018) serta Abdullah, dkk. (2010) dikarenakan jumlah komisaris harus disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan manajemen dan *shareholder* dapat terjadi karena asimetri informasi di kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris berperan sebagai organ perusahaan yang mewakili *shareholder* untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, khususnya kinerja manajemen agar memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham (Siregar dan Rahayu, 2018). Untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, ukuran dewan komisaris perlu ditinjau untuk memastikan bahwa kinerja dewan komisaris dapat terlaksana dengan baik. Jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak akan menjadikan fungsi pengawasan terhadap manajemen lebih optimal sehingga manajemen tidak melakukan salah saji laporan keuangan yang mampu mengakibatkan perusahaan melakukan *financial restatement*. Namun

konsep ini tidak sejalan dengan hasil analisis dimana besar kecilnya ukuran dewan komisaris rupanya tidak menjamin keefektifitasan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga ukuran dewan komisaris tidak berdampak pada *financial restatement*.

Dengan demikian, ukuran dewan komisaris harus memperhatikan ukuran maupun tingkat kompleksitas perusahaan (Siregar dan Rahayu, 2018). Apabila ukuran perusahaan kecil dan tidak kompleks usahanya, maka jumlah komisaris yang banyak justru akan menyebabkan fungsi pengawasan tidak efektif. Dengan begitu semakin besar ukuran dewan komisaris tidak dapat menjamin bahwa *financial restatement* tidak terjadi.

b. Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris

Adanya komisaris Wanita dalam jajaran komisaris terbukti berpengaruh negatif terhadap *financial restatement* sehingga H1_b diterima. Hal ini sama dengan hasil pengujian Puspita dan Januarti (2014) serta Abbott, dkk. (2012) yang menyebutkan bahwa komisaris wanita berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

Berdasarkan teori keagenan, pengawasan oleh komisaris untuk mengawasi manajemen adalah Langkah efektif guna mengurangi terjadinya konflik kepentingan. Adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen membuat manajemen tidak dapat melakukan salah saji laporan keuangan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan *financial restatement*. Pada model stereotip gender, pria dan wanita dinilai memiliki karakteristik dan perilaku yang cenderung berbeda satu sama lain (Broadbridge dan Fielden, 2015). Hal ini juga dapat dilihat pada perbedaan sikap dan perilaku antara dewan komisaris pria dan wanita. Dewan komisaris wanita dinilai lebih teliti, kritis, peka dan responsif terhadap situasi perusahaan sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi tanda-tanda munculnya tindakan oportunistik manajemen (Puspita dan Januarti, 2014). Keberagaman gender

dalam jajaran dewan komisaris mampu menciptakan komposisi dewan komisaris yang baik dan membuat fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif sehingga *financial restatement* tidak terjadi.

c. Usia Dewan Komisaris

Usia komisaris terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial restatement* sehingga H1_c ditolak. Penelitian ini sama hasilnya dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Hasnan dan Marzuki (2017). Pada teori keagenan, komisaris melakukan pengawasan untuk memantau kinerja manajemen sehingga konflik kepentingan tidak terjadi. Mahadeo, dkk. (2012) menyebutkan bahwa usia dewan komisaris mampu mempengaruhi kualitas kinerja dewan komisaris tersebut, dimana dewan komisaris yang lebih tua dianggap lebih mampu mengambil keputusan dengan tidak impulsif dimana keputusan tersebut dibuat berdasarkan wawasan dan pengalaman yang telah dimilikinya selama rentang hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian usia komisaris tidak berdampak pada *financial restatement*, dimana usia dewan komisaris tidak dapat dijadikan faktor penentu kualitas kinerja dewan komisaris tersebut (Hasnan dan Marzuki, 2017). Tingkat pengetahuan, kompetensi, dan wawasan bisnis yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat ditentukan berdasarkan usia. Semakin tua usia dewan komisaris dinilai tidak mampu menjamin tingkat produktivitas kerja seseorang mengingat batas atas angkatan kerja yang dinilai ideal berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 adalah 64 tahun.

d. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dari hasil uji, H1_d diterima dimana masa jabatan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Donoher (2009) yang menyebutkan bahwa semakin lama masa jabatan dewan komisaris membuat pengawasan terhadap manajemen juga makin baik dan *financial restatement* tidak terjadi. Dengan kehadiran komisaris yang mengawasi

kinerja manajemen tentunya manajemen akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan keinginan *shareholder* sehingga konflik kepentingan tidak terjadi.

Komisaris dengan masa jabatan yang lama dapat membuat keefektifitasan pengawasan terhadap manajemen juga semakin baik karena komisaris tersebut memiliki pengetahuan, wawasan, dan kredibilitas kinerja yang semakin baik (Hasnan dan Marzuki, 2017). Oleh karena itu, pengawasan yang baik akan menuntun kinerja manajemen dengan lebih baik dalam penyajian laporan keuangan sehingga tidak terjadi salah saji laporan keuangan yang menyebabkan perusahaan melakukan *financial restatement*.

e. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang memiliki jabatan lebih dari satu di suatu perusahaan rupanya tidak berdampak pada terjadinya *financial restatement* sehingga H1_e ditolak. Hal ini sama dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Hasnan dan Hussain (2015). Adanya rangkap jabatan dewan komisaris tidak mampu menjamin keefektifitasan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dari perspektif *busyness hypothesis* dewan komisaris yang merangkap jabatan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mampu berfokus pada satu perusahaan sehingga fungsi pengawasan terhadap manajemen juga tidak dapat terjamin semakin baik (Hasnan dan Hussain, 2015). Dengan demikian, adanya rangkap jabatan dewan komisaris pada posisi dewan di perusahaan lain dinilai tidak dapat menjamin keefektifitasan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*.

2. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Restatement

a. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial restatement* sehingga H2_a ditolak. Hasil ini sejalan dengan

penelitian Hasnan, dkk. (2019), Siregar dan Rahayu (2018), serta Kusumo dan Meiranto (2014).

Komite audit disusun untuk membantu dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan apabila fungsi pengawasan semakin efektif maka manajemen akan membuat pelaporan keuangan secara apa adanya dan tidak akan menyebabkan *financial restatement*. Tetapi, teori keagenan ini tidak sejalan dengan hasil uji hipotesis dimana ukuran komite audit perlu disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan agar menciptakan fungsi pengawasan yang optimal. Kebutuhan akan jumlah anggota komite audit pada perusahaan besar dengan kompleksitas usaha yang tinggi tentunya akan berbeda dengan perusahaan yang tidak terlalu besar serta tidak kompleks.

b. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial restatement* sehingga H2_b ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hasnan, dkk. (2019), Rani dan Syafruddin (2011), serta Lin, Li, dan Yang (2006) yang menyebutkan bahwa kompetensi komite audit yang semakin tinggi tidak dapat menjamin bahwa salah saji laporan keuangan yang akan menyebabkan *financial restatement* tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan kompetensi akuntansi atau keuangan yang dimiliki komite audit memang dapat mempermudah proses penelaahan informasi keuangan dimana hal ini ditandai dengan adanya koefisien regresi yang negatif namun kompetensi komite audit tersebut tidak dapat menjamin bahwa salah saji laporan keuangan tidak akan terjadi (Hasnan, dkk., 2019). Selain itu kompetensi komite audit tidak berdampak pada *financial restatement* karena kompetensi tersebut tidak diperbarui dengan pengetahuan akuntansi atau keuangan lainnya yang selalu *update* dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan POJK No.55/POJK.04/2015 yang menjelaskan bahwa anggota komite audit harus

senantiasa memperbaharui wawasan yang dimilikinya baik dengan pelatihan maupun mengambil jenjang pendidikan berikutnya.

c. Independensi Komite Audit

Independensi komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial restatement* sehingga H_{2c} ditolak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Hasnan, dkk. (2019) dan Carcello, dkk. (2011) yang menyebutkan bahwa independensi komite audit tidak dapat menjamin bahwa manajemen tidak dapat melakukan salah saji laporan keuangan yang menyebabkan tidak terjadinya *financial restatement*. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam komite audit tidak mampu menjamin keefektifitasan fungsi pengawasan komite audit baik terhadap perusahaan atau laporan keuangan (Hasnan, dkk., 2019). Rata-rata proporsi komisaris independen yang ada dalam komite audit adalah 1/3 total anggota dimana hal ini diduga hanya untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh POJK No.55/POJK.04/2015 yang menyebutkan bahwa komite audit minimal mempunyai 1 (satu) anggota dari komisaris independen.

Simpulan

Penelitian ini memiliki beberapa simpulan yaitu (1) karakteristik dewan komisaris yang meliputi keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan dengan adanya masa jabatan dewan komisaris yang semakin lama akan meningkatkan keefektifitasan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga tidak terjadi *financial restatement*. Sedangkan karakteristik dewan komisaris yang diwakili dengan ukuran dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*. (2) Karakteristik komite audit yang diwakili dengan ukuran

dewan komisaris, usia dewan komisaris, rangkap jabatan dewan komisaris, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*.

Adapun keberbatasan pada penelitian adalah objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dimana banyaknya informasi proksi dari variabel independen yang tidak tercantum dalam laporan tahunan. seperti usia dewan komisaris dan kompetensi komite audit yang menyebabkan penurunan sampel yang cukup banyak. Selain itu perusahaan yang melakukan *financial restatement* pada hasil penelitian hanya sebesar 9,07% sehingga menunjukkan perbandingan yang cukup besar dengan perusahaan yang tidak melakukan *financial restatement* yang diduga menyebabkan banyaknya hipotesis penelitian yang tidak berpengaruh.

Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai *financial restatement* yaitu dapat memperluas objek yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian tidak hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI saja melainkan dapat diteliti pada perusahaan di bidang lain seperti perusahaan bidang perbankan, pertanian, dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Abbott, L. J., Parker, S., dan Presley, T. J. (2012). Female Board Presence and The Likelihood of Financial Restatement. *Accounting Horizons*, 26(4), 607–629.
- Adams, R. B., dan Ferreira, D. (2009). Women in The Boardroom and Their Impact on Governance and Performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309.
- Broadbridge, A., dan Fielden, S. (2015). Handbook of Gendered Careers in Management: Getting In, Getting On, Getting Out. Edward Elgar Publishing Limited.
- Broadbridge, A., dan Fielden, S. (2015). Handbook of Gendered Careers in Management: Getting In, Getting On, Getting Out. Edward Elgar Publishing Limited.

- Caragih. (2013). Karakteristik Sosial Secara Umum. Didapat dari <https://www.idjurnal.com/2015/06/pengertian-karakteristik-secara-umum.html>, 27 November 2020, pukul 14:16 WIB.
- Carcello, J. V., Neal, T. L., Palmrose, Z. V., dan Scholz, S. (2011). CEO Involvement in Selecting Board Members, Audit Committee Effectiveness, and Restatements. *Contemporary Accounting Research*, 28(2), 396–430.
- CNN Indonesia. (2019, April 30). *Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. Didapatkan dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia>, 08 September 2020, pukul 15.55 WIB.
- Donoher, W. J. (2009). Firm Founders, Boards, and Misleading Disclosures: An Examination of Relative Power and Control. *Journal of Managerial Issues*, 21(3), 309–326.
- General Accountability Office (2006). Financial Restatement: Update of Public Company Trends, Market Impacts, and Regulatory Enforcement Activities. Didapat dari <http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-06-678>, 26 Agustus 2020, pukul 13:53 WIB.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hasnan, S., dan Hussain, A. R. (2015). Factors Associated with Financial Restatements: Evidence from Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 44(2015), 105-116.
- Hasnan, S., dan Marzuki, H. (2017). Board of Directors' Characteristics and Financial Restatement. *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 14(1), 1–22.
- Hasnan, S., Rahman, N. A. A., dan Ali, M. M. (2019). Audit Committee Characteristics and Financial Restatements: Evidence from Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(6), 137–149.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M, dan Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 308–309.
- Kamardin, H., Latif, R. A., Mohd, K. N. T., dan Adam, N. C. (2014). Multiple Directorships and The Monitoring Role of The Board of Directors: Evidence from Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 42(2014), 51–62.
- Kusumo, R. W., dan Meiranto. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Corporate. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–11.
- Latifah, S. W., Rosyid, M. F., Purwanti, L., dan Oktavendi, T. W. (2019). Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Sustainability Report (BUMN yang Listed di BEI). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 200–213.
- Lin, J. W., Li, J. F., dan Yang, J. S. (2006). The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality. *Managerial Auditing Journal*, 21(9), 921–933.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Mahadeo, J. D., Soobaroyen, T., dan Hanuman, V. O. (2012). Board Composition and Financial Performance: Uncovering the Effects of Diversity in an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 105(3), 375–388.
- Mohammad, W. M. W., Wasiuzzaman, S., Morsali, S. S., dan Zaini, R. M. (2018). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia. *Journal of Asia-Pacific Business*, 19(1), 4–22.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- _____. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Puspitasari, D., dan Januarti, I. (2014). Pengaruh Keberadaan Wanita dalam

- Keanggotaan Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–15.
- Rani, P. M., dan Syafruddin, M. (2011). Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (dengan Menggunakan Earning Restatement Sebagai Proksi dari Manajemen Laba). <http://eprints.undip.ac.id/29502/>, 25 November 2020, pukul 20.34 WIB.
- Siregar, N. Y., dan Rahayu, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Restatement dan Dampaknya terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah ESAI 12(2)*, 71-88.
- Yuristrisia, C., dan Lukviarman, N. (2008). Analisis Hubungan antara Strong Boards dan External Governance terhadap Accounting Restatement. *Jurnal Siasat Bisnis*, 12(2), 89–114.